

Analisis Kinerja Pembangunan - Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditinjau dari Aspek Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua Barat

Bustang¹, Rohmad Supriyadi², Irfan Tanjuang³, Arifin Bakti Nur Rocman⁴
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Republik Indonesia

I. Pendahuluan

Pada laman sekretariat Kabinet pada tanggal 19 Jul 2017, menampilkan berita IPM Rendah, Presiden Jokowi Minta Papua Barat Percepat Bangun Pelabuhan, Bandara, dan Jalan Strategis, dimana dalam pengantarnya, Presiden Jokowi mengatakan, tantangan yang dihadapi Provinsi Papua Barat, yakni bagaimana membuka agar keterisolasian, membuka semakin banyak lapangan pekerjaan yang baru, pengentasan kemiskinan, pembangunan yang lebih merata. Ia mengingatkan, angka IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Papua Barat adalah yang kedua terendah di Indonesia.

Percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas apabila tidak dibarengi dengan percepatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) akan menyebabkan infrastruktur dan konektivitas yang terbangun tidak mampu dimanfaatkan secara optimal oleh orang Papua (Orang Asli Papua/OAP) dan malah akan dimanfaatkan oleh orang luar Papua untuk berinvestasi dan mengeruk kekayaan sumberdaya alam (SDA) yang terkandung di bumi Papua.

Tulisan ini sifatnya untuk melengkapi dan memperjelas upaya peningkatan kinerja capaian IPM dari Aspek Pembangunan Pendidikan yang merupakan salah satu aspek pembentuk IPM, disamping Aspek Kesehatan dan Income Per Capita. Dalam tulisan ini juga berusaha menggambarkan ketersediaan fasilitas layanan pendidikan (sekolah) dan tenaga pendidik masing-masing jenjang pendidikan di kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat. Hal ini akan memperjelas kabupaten mana yang memerlukan investasi sekolah dan guru masing-masing jenjang pendidikan tersebut dan kabupaten/kota mana yang sudah tidak memerlukan intervensi fasilitas layanan pendidikan dan tenaga pengajar. Hal ini akan mampu mengeliminir penumpukan fasilitas layanan pendidikan dan guru pada masing-masing jenjang pendidikan. Diharapkan dampak lanjutannya terjadi pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan pembangunan yang terjadi pada saat ini.

Tulisan ini diakhiri dengan rekomendasi kebijakan yang merupakan alternatif pilihan kebijakan terbaik dari model pelaksanaan pendidikan dasar dan menengah yang saat ini sudah diimplementasikan di sebagian kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat. Model penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah khas Papua yang dirumuskan berdasarkan kondisi budaya dan perilaku keseharian masyarakat asli Papua yang hidup didalam keterisolasian, jumlah penduduk yang sedikit di setiap kampung, peradaban masyarakat asli Papua di daerah terisolir yang masih jauh tertinggal (Peramu) dibanding masyarakat di pulau lain Indonesia, serta kewenangan penyelenggaraan pendidikan dasar (SD dan SMP) yang berada di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pendidikan menengah (SMA dan SMK) yang ada di tingkat Provinsi.

Kinerja pembangunan pendidikan di Provinsi Papua Barat menunjukkan kinerja pembangunan pendidikan yang baik, ditunjukkan dalam tabel B.1. dimana kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2016 di Provinsi Papua Barat yang mencapai angka 62,21. Dengan kontribusi angka melek huruf (AMH) tahun 2013 yang sebesar 94,14, dengan harapan lama sekolah (HLS) sebesar 12,31 tahun, atau setingkat mahasiswa tahun ke 1, dengan rata-rata lama sekolah (RLS) sebesar 7,06 tahun, atau setingkat kelas 1 SMP. Pendapatan per capita Dan, dengan penduduk di Provinsi Papua Barat sebesar 7.063.880 menunjukkan pendapatan rata-rata penduduk Papua lebih besar dibanding provinsi Papua.

Sementara dari sisi ketersediaan prasarana sekolah SD, menunjukkan kondisi adanya

1. Bustang is a Senior Planner Staff, Ministry of National Development Planning/BAPPENAS. Email: bustang@bappenas.go.id

2. Rohmad Supriyadi is a Head of Planning, Organization and Governance Bureau, Ministry of National Development Planning/BAPPENAS.

3. Irfan Tanjuang is a Head of Sub Directorate of Performance and Monitoring Accountability System, Ministry of National Development Planning/BAPPENAS

4. Arifin Bakti Nur Rocman is Senior Expert on Basic Service Provision, Secretariat of Papua Development Acceleration - National Development Planning/BAPPENAS

kekurangan sekolah SD diseluruh Provinsi Papua Barat sebesar 540 sekolah atau 0,34%, artinya 34% kampung-kampung yang ada di Provinsi Papua Barat belum memiliki fasilitas layanan pendidikan sekolah dasar (SD).

Tabel 1. Analisis Kinerja Pembangunan Pendidikan Di Provinsi Papua Barat

Kab./Kota	Kampung	\sum SD	$\frac{\sum \text{SD} - \sum \text{Kampung}}{\sum \text{Kampung}}$	$\frac{\sum \text{SD}}{\sum \text{Kampung}}$	IPM 2016	AMH 2013	HLS 2016	RLS 2016	Income/kapita 2015
Fakfak	123	114	9	0,93	65,55	99,12	13,61	8,22	6795,92
Kaimana	86	85	1	0,99	62,15	97,49	11,46	7,83	7340,72
Teluk Wondama	77	52	25	0,68	57,16	85,79	10,48	6,57	7317,18
Teluk Bintuni	238	75	163	0,32	61,81	87,41	11,62	7,57	9128,73
Manokwari	160	113	47	0,71	70,34	89,98	13,51	7,85	11.327,54
Sorong Selatan	121	83	38	0,69	59,20	88,56	11,93	6,95	5549,53
Sorong	141	126	15	0,89	62,42	92,09	12,81	7,57	6456,88
Raja Ampat	121	105	16	0,87	61,95	94,86	11,65	7,53	7190,89
Tambrauw	76	53	23	0,70	50,35	77,72	10,89	4,70	4431,46
Maybrat	157	59	98	0,38	56,35	91,41	12,31	6,33	4575,61
Manokwari Selatan	57	33	24	0,58	57,12	77,45	12,20	6,32	4578,05
Peg. Arfak	179	57	122	0,32	53,89	74,89	11,07	4,90	4569,73
Kota Sorong	31	72	-41	2,32	76,33	99,71	14,00	10,91	12.589,90
Papua Barat	1567	1027	540	0,66	62,21	94,14	12,31	7,06	7.063,88

Sumber : Diolah dari data dapodik dan Hasil Sensus Potensi Desa (Podes)

Berdasarkan data dalam tabel diatas juga dapat diketahui bahwa kabupaten/kota yang memiliki IPM tertinggi adalah Kota Sorong sebesar 76,38 dan Kabupaten Manokwari sebesar 70,34. Sedangkan kabupaten yang memiliki IPM terendah adalah Kabupaten Pegunungan Arfak sebesar 53,89, dan Kabupaten Tambrauw sebesar 50,35.

Dan, angka melek huruf tertinggi ada di Kota Sorong (99,71 %) penduduk di Kota Sorong dan Kabupaten Fakfak (99,12%) penduduk di Kabupaten Fakfak sudah melek huruf, sementara kabupaten dengan angka melek huruf terendah adalah Kabupaten Pegunungan Arfak sebesar 74,89% dan Kabupaten Tambrauw sebesar 77,72% penduduknya yang melek huruf, atau sekitar 25,11% penduduk di Kabupaten Pegunungan Arfak dan 22,28% penduduk di Kabupaten Tambrauw yang masih tuna aksara .

Di samping itu, harapan lama sekolah tertinggi di Provinsi Papua Barat ada di Kota Sorong sebesar 14 tahun dan Kabupaten Fakfak sebesar 13,61 tahun, sementara kabupaten yang memiliki HLS terendah adalah Kabupaten Teluk Wondama sebesar 10,48 tahun dan Kabupaten Tambrauw sebesar 10,89 tahun, atau kelas 2 SMP. Dan, rata-rata lama sekolah tertinggi di Provinsi Papua Barat ada di kota Sorong sebesar 10,91 tahun dan Kabupaten Fakfak selama 8,22 tahun , dan kabupaten dengan RLS terendah adalah ada di Kabupaten Tambrauw sebesar 4,70 tahun dan di Kabupaten Pegunungan Arfak sebesar 4,90 tahun.

Dan, income per capita tertinggi di Provinsi Papua Barat ada di kota Sorong 12.589,90 dan di Kabupaten Manokwari yang sebesar 11.327,54, sementara kabupaten dengan income per capita paling rendah ada di Kabupaten Tambrauw sebesar 4431,46 dan pegunungan arfak sebesar 4569,73.

Dari sisi ketersediaan layanan pendidikan SD menunjukkan gambaran, ketersediaan layanan pendidikan SD tertinggi ada di Kota Sorong dengan rata-rata setiap kampung terdapat 2,32 Sekolah, sementara kabupaten lainnya masih menunjukkan kondisi tidak semua kampung ada gedung sekolahnya dengan kondisi terparah ada di Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Pegunungan Arfak yang mengalami kondisi kekurangan layanan pendidikan sama sama sebesar

68% , artinya 68% kampung di kedua kabupaten tersebut tidak tersedia layanan pendidikan SD. Secara kuantitatif dari 540 kampung yang tidak tersedia layanan pendidikan SD, terdapat di Kabupaten Pegunungan Arfak sebanyak 122 kampung dan Kabupaten Teluk Bintuni sebanyak 163 kampung yang tidak tersedia fasilitas layanan pendidikan SD.

Dilihat dari ketersediaan fasilitas layanan pendidikan SMP dan SMA/SMK di setiap distrik di Provinsi Papua Barat menunjukkan gambaran seperti dalam tabel 2 yang menunjukkan bahwa secara agregat terdapat kecukupan ketersediaan layanan pendidikan SMP dan SMA/SMK di Provinsi Papua Barat. Akan tetapi apabila dilihat mendalam per kabupaten/kota menunjukkan gambaran fakta sesungguhnya dimana untuk fasilitas layanan pendidikan SMP di Kabupaten Tambrauw dan Maybrat terdapat kekurangan fasilitas pendidikan SMP, yang ditunjukkan dengan data hanya 48% distrik di Kabupaten Tambrauw dan 50% distrik di Kabupaten Maybrat yang belum terdapat fasilitas layanan pendidikan SMP, atau masih kekurangan fasilitas layanan pendidikan SMP sebesar 15 sekolah di Kabupaten Tambrauw dan 12 fasilitas layanan pendidikan SMP di Kabupaten Maybrat.

Dengan melihat data tersebut maka dapat diketahui kesenjangan ketersebaran dan pemerataan fasilitas layanan pendidikan SMP di Provinsi Papua Barat, dimana secara agregat menunjukkan ketercukupan/kelebihan fasilitas layanan pendidikan SMP dalam faktanya masih terdapat distrik dan kabupaten yang kekurangan fasilitas layanan pendidikan SMP. Untuk selanjutnya dukungan pembangunan fasilitas layanan pendidikan SMP harus difokuskan kepada Kabupaten Tambrauw dan Maybrat yang mengalami kekurangan fasilitas layanan pendidikan SMP yang paling parah, agar dapat mengejar ketertinggalan dalam pembangunan pendidikan dibandingkan kabupaten-kabupaten lainnya.

Tabel 2. Ketersediaan Layanan Pendidikan SMP dan SMA/SMK di tiap Distrik Provinsi Papua Barat

Kabupaten/Kota	Σ Distrik	Σ SMP	Σ SMP- Σ distrik	Σ SMP: Σ distrik	Σ SMA & SMK	Σ SMA & SMK- Σ distrik	Σ SMA & SMK: Σ distrik
Sorong	30	42	12	1,4	25	-5	0,83
Manokwari	9	37	28	4,11	23	14	2,56
Fakfak	17	20	3	1,18	9	-8	0,53
Sorong Selatan	15	18	3	1,20	7	-8	0,47
Raja Ampat	24	31	7	1,29	20	-4	0,83
Teluk Bintuni	24	32	8	1,33	16	-8	0,67
Teluk Wondama	13	14	1	1,08	5	-8	0,38
Kaimana	7	17	10	2,43	7	0	1,00
Tambrauw	29	14	-15	0,48	8	-21	0,28
Maybrat	24	12	-12	0,50	4	-20	0,17
Manokwari Selatan	6	8	2	1,33	6	0	1,00
Peg. Arfak	10	14	4	1,40	8	-2	0,80
Kota Sorong	10	30	20	3,00	34	24	3,40
Papua Barat	218	289	71	1,33	172	46	0,79

Sumber: Data Kemendagri dan Dapodik Diolah

Dari data dalam tabel di atas juga dapat diketahui, untuk fasilitas layanan pendidikan SMA dan SMK di Provinsi Papua Barat mengalami kekurangan, dimana hanya 79% (172) distrik di Provinsi Papua Barat yang terdapat fasilitas layanan pendidikan SMA/SMK, sementara 21% distrik atau 46 distrik di Provinsi Papua Barat yang belum memiliki fasilitas layanan pendidikan SMA/SMK. Kabupaten yang memiliki fasilitas layanan pendidikan SMA/SMK terbanyak adalah kota Sorong sebanyak 34 sekolah, dan Kabupaten Manokwari sebanyak 23 sekolah, sementara kabupaten yang memiliki fasilitas layanan pendidikan SMA/SMK terendah adalah Kabupaten Tambrauw sebesar 28% (8 distrik) dan Kabupaten Maybrat sebesar 17% (4 distrik), atau mengalami kekurangan fasilitas layanan pendidikan SMA/SMK sebesar 21 sekolah di Kabupaten Tambrauw dan 20 sekolah di Kabupaten Maybrat.

Untuk selanjutnya dukungan pembangunan pendidikan khususnya untuk penyediaan fasilitas layanan pendidikan SMA/SMK seyogyanya ditujukan kepada Kabupaten Tambrauw dan Maybrat disamping kabupaten lainnya yang mengalami kekurangan fasilitas layanan pendidikan SMA/SMK seperti kabupaten : Peg. Arfak, Sorong, Sorong Selatan.

Dari data dalam tabel diatas juga dapat diketahui adanya ketimpangan yang sangat tajam dan ketidakmerataan keterseberan fasilitas layanan pendidikan SMP dan SMA/SMK, salah satu penyebabnya adalah pemekaran kabupaten baru yang efek lanjutannya terjadi pemekaran distrik baru, sehingga distrik dan kabupaten baru yang dimekarkan membutuhkan fasilitas layanan pendidikan setingkat SMP dan SMA/SMK baru. Teluk Bintuni, Teluk Wondama dan Raja Ampat. Dilihat dari ketersediaan guru dan rata-rata guru disetiap tingkatan, menunjukkan kondisi seperti terlihat dalam tabel B.3. dibawah ini.

Tabel 3. Perbandingan Ketersediaan Guru dengan Sekolah di Provinsi Papua Barat

Kab./Kota	\sum Guru SD	\sum Guru SMP	\sum Guru SMA&SMK	\sum SD	\sum SMP	\sum SMA & SMK	\sum Guru SD: \sum SD	\sum Guru SMP: \sum SMP	\sum Guru SMA & SMK: \sum SMA&SMK
Kota Sorong	1.135	534	754	72	30	34	15,76	17,8	22,18
Manokwari	1.174	548	588	113	37	23	10,39	14,81	25,57
Sorong	894	421	398	126	42	25	7,10	10,02	15,92
Fak-Fak	975	371	279	114	20	9	8,55	18,55	31,00
Teluk Bintuni	545	330	221	75	32	16	7,27	10,31	13,81
Raja Ampat	456	289	282	105	31	20	4,34	9,32	14,10
Sorong Selatan	516	263	186	83	18	7	6,22	14,61	26,57
Kaimana	537	223	192	85	17	7	6,32	13,12	27,43
Teluk Wondama	338	138	100	52	14	5	6,50	9,86	20,00
Maybrat	263	139	79	59	12	4	4,46	11,58	19,75
Tambrauw	269	125	67	53	14	8	5,08	8,93	8,38
Pegunungan Arfak	219	106	97	57	14	8	3,84	7,57	12,13
Manokwari Selatan	209	92	99	33	8	6	6,33	11,50	16,50
Papua Barat	7.530	3.579	3342	1027	289	172	7,33	12,38	19,43

Sumber: DAPODIK–Kemendikbud, diolah

Berdasarkan data dalam tabel di atas menunjukkan untuk jenjang pendidikan SD, rata-rata terdapat 7,33 orang guru setiap sekolah dasar (SD), dan untuk jenjang SMP menunjukkan jenjang SMP menunjukkan rata-rata setiap sekolah terdapat 12,38 guru dan untuk jenjang SMA/SMK menunjukkan setiap sekolah terdapat 19,43 orang guru.

Dari data diatas dapat diketahui untuk jenjang SD, menunjukkan rata-rata jumlah guru setiap sekolah mendekati jumlah ideal yang dipersyaratkan (terlepas dari kualifikasi guru), sementara untuk jenjang SMP dan SMA & SMK menunjukkan kondisi yang sudah ideal. Akan tetapi, apabila dicek lebih mendalam ke setiap kabupaten menunjukkan kondisi yang berbeda, dimana untuk jenjang SD rata-rata guru disetiap sekolah terbesar ada di Kota Sorong dan Kabupaten Manokwari, masing-masing rata-rata setiap sekolah di kota Sorong terdapat sebanyak 15,76 orang sementara Kabupaten Manokwari sebanyak 10,39 orang setiap sekolah. Hal ini berbeda secara ekstrim dengan kondisi yang ada di Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kabupaten Raja Ampat, yang rata-rata setiap sekolah terdapat 3,84 orang guru dan 4,34 orang guru di setiap sekolahnya.

Sementara untuk jenjang SMP menunjukkan secara agregat setiap sekolah SMP terdapat 12,38 orang guru, suatu jumlah yang sudah mencukupi, tetapi apabila ditelaah lebih mendalam ke setiap kabupaten/kota menunjukkan gambaran Kabupaten Fakfak dan Kota Sorong memiliki rata-rata giuru yang cukup tinggi disetiap sekolahnya dimana rata-rata guru disetiap sekolah SMP di Kabupaten Fakfak berjumlah 18,55 orang guru dan di Kota Sorong rata-rata setiap SMP terdapat guru sebanyak 17,8 orang. Sementara, kabupaten dengan rata-rata guru di setiap SMP terkecil ada di Kabupaten Pegunungan Arfak sebanyak 7,57 orang dan Kabupaten Tambrauw sebanyak 8,93 orang di setiap sekolahnya.

Dan, untuk jenjang pendidikan SMA dan SMK menunjukkan gambaran secara agregat masing masing SMA & SMK terdapat 19,43 orang guru, akan tetapi apabila dilihat lebih mendalam kesetiap kabupaten menunjukkan kondisi, kabupaten/kota yang memiliki rata-rata guru terbesar ada di Kabupaten Fakfak sebanyak 31 orang guru disetiap sekolah dan Kabupaten Kaimana dengan jumlah guru sebanyak 27,43 orang. Sementara itu, kabupaten dengan rata-rata jumlah guru terendah disetiap sekolah ada di Kabupaten Tambrauw dengan jumlah rata-rata guru disetiap sekolah sebanyak 8,38 orang dan Kabupaten Pegunungan Arfak dengan rata-rata guru setiap sekolah SMA & SMK sebanyak 12,13 orang. Dilihat dari perbandingan murid dan guru di Provinsi Papua Barat pada masing masing jenjang pendidikan menunjukkan gambaran seperti dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4. Rasio Antara Jumlah Murid dan Jumlah Guru masing masing Jenjang Pendidikan Di Provinsi Papua Barat

Kab/Kota	\sum Murid SD	\sum Murid SMP	\sum Murid SMA & SMK	\sum Guru SD	\sum Guru SMP	\sum Guru SMA & SMK	$\frac{\sum \text{Murid}}{\sum \text{Guru SD}}$	$\frac{\sum \text{Murid}}{\sum \text{Guru SMP}}$	$\frac{\sum \text{Murid}}{\sum \text{Guru SMA \& SMK}}$
Kota Sorong	23.305	9.543	10.606	1.135	534	754	21	18	14,07
Manokwari	22.793	8.553	7.790	1.174	548	588	19	16	13,25
Sorong	13.959	4.891	4.239	894	421	398	16	12	10,65
Teluk Bintuni	10.293	3.370	13.663	545	330	221	19	10	61,82
Raja Ampat	9.770	3.075	12.845	456	289	282	21	11	45,55
Sorong Selatan	9.582	2.650	1.823	516	263	186	19	10	9,8
Teluk Wondama	5.290	1.924	1116	338	138	100	16	14	11,16
Pegunungan Arfak	5.340	1.258	553	219	106	97	24	12	5,7
Maybrat	4.374	1.038	517	263	139	79	17	7	6,54
Tambrauw	4.180	1.140	573	269	125	67	16	9	8,55
Manokwari Selatan	2.919	1.187	823	209	92	99	14	13	8,31
Fak-Fak	10.743	3.890	3022	975	371	279	11,02	13,94	10,83
Kaimana	9.167	2.941	2.193	537	223	192	17,07	13,19	11,42

Papua Barat	131.715	6.831	5.215	1512	594	471	87,11	11,5	11,07
-------------	---------	-------	-------	------	-----	-----	-------	------	-------

Sumber: Data Dapodik-Kemendikbud diolah

Berdasarkan data dalam tabel diatas dapat diketahui bahwa rasio murid dan guru di Provinsi Papua Barat menunjukkan kondisi adanya kekurangan guru SD, hal ini ditunjukkan dengan rasio jumlah murid dan jumlah guru yang menunjukkan angka 87,11 per satu orang guru SD, sementara untuk jumlah guru SMP dan SMA & SMK menunjukkan rasio yang sudah mencukupi, hal ini ditunjukkan dengan rasio murid dan guru SMP dan SMA & SMK yang menunjukkan angka 11,5 (SMP) dan 11,07 (SMA & SMK).

Kekurangan guru SD agar mencapai rasio yang ideal antara jumlah murid dan guru SD dimana jumlah murid SD sebanyak 131 715 dengan rata-rata rasio jumlah murid dan guru ideal untuk SD sebanyak 20 orang murid per satu orang guru maka dibutuhkan jumlah guru sebanyak 6.586 orang guru, sementara jumlah guru SD yang ada sebanyak 1.512 orang guru, maka kekurangan guru SD untuk mencapai rasio yang ideal jumlah murid dan jumlah guru SD sebanyak 5.074 orang guru.

Berdasarkan data dan analisis di atas dapat dirumuskan bahwa terdapat ketidak merataan persebaran guru baik untuk jenjang SD, SMP dan SMA & SMK, dimana guru banyak menumpuk di Kabupaten Manokwari, Fakfak, Kaimana dan Kota Sorong, sementara guru-guru di kabupaten pemekaran baru menunjukkan kondisi yang masih sangat kekurangan guru khususnya guru SD. Dari data diatas juga dapat diketahui bahwa untuk fasilitas layanan pendidikan menengah (SMP dan SMA & SMK) menunjukkan rata-rata jumlah guru yang memadai kecuali di kabupaten pemekaran baru. Untuk itu dukungan pengadaan guru baru sudah semestinya diarahkan untuk diadakan di kabupaten pemekaran baru seperti: Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Sorong Selatan

Sementara apabila dilihat berdasarkan kawasan adat, maka kondisi ketersediaan sekolah dan penyebaran tenaga pengajar menunjukkan gambaran seperti dibawah ini,

1. Wilayah Adat Domberay

Wilayah Adat Domberay merupakan wilayah kepulauan, pesisir dan pegunungan dengan jumlah penduduk sebanyak 494.451 jiwa. Wilayah adat Domberay terdiri dari 11 kabupaten yaitu Teluk Wondama; Teluk Bintuni, Manokwari; Sorong Selatan; Sorong; Raja Ampat; Tambrauw; Maybrat; Manokwari Selatan; Pegunungan Arfak dan Kota Sorong. Sektor unggulan di wilayah adat Domberay adalah hasil alam berupa ikan dan hasil laut lainnya, industri migas dan sektor pariwisata. Sehingga sangat cocok apabila di Wilayah Adat ini didirikan sekolah kejuruan atau universitas yang fokus terhadap sektor unggulan seperti SMK kejuruan Perikanan atau Sekolah Tinggi Ilmu Perikanan. Dengan adanya industri Migas dan adanya sektor unggulan pariwisata, maka diperlukan adanya sekolah atau pelatihan yang dapat memberikan ilmu pertambangan dan pariwisata sehingga dapat memberikan ilmu pengetahuan untuk masyarakat sekitar agar dapat memanfaatkan sumber daya alamnya dengan baik dan meningkatkan kesejahteraan warga disekitar wilayah tersebut.

Untuk mengetahui ketersediaan fasilitas layanan pendidikan SD di wilayah adat Domberay, dapat dilihat dari data dalam tabel B.4. yang ada dibawah ini.

Tabel 5. Perbandingan Jumlah Kampung dan distrik dengan Sekolah Dasar (SD) di Wilayah Adat Domberay

Kabupaten/Kota	Kampung	\sum SD	\sum SD - \sum Kampung	\sum SD : \sum Kampung	IPM 2016	AMH 2013	HLS 2016	RLS 2016	Income/kapita 2015
Teluk Wondama	77	52	25	0,68	57,16	85,79	10,48	6,57	7317,18
Teluk Bintuni	238	75	163	0,32	61,81	87,41	11,62	7,57	9128,73
Manokwari	160	113	47	0,71	70,34	89,98	13,51	7,85	11.327,54
Sorong Selatan	121	83	38	0,69	59,20	88,56	11,93	6,95	5549,53
Sorong	141	126	15	0,89	62,42	92,09	12,81	7,57	6456,88

Raja Ampat	121	105	16	0,87	61,95	94,86	11,65	7,53	7190,89
Tambrauw	76	53	23	0,70	50,35	77,72	10,89	4,70	4431,46
Maybrat	157	59	98	0,38	56,35	91,41	12,31	6,33	4575,61
Manokwari Selatan	57	33	24	0,58	57,12	77,45	12,20	6,32	4578,05
Pegunungan Arfak	179	57	122	0,32	53,89	74,89	11,07	4,90	4569,73
Kota Sorong	31	72	-41	2,32	76,33	99,71	14,00	10,91	12.589,90
Papua Barat	1358	828	(530)	0,61	60,63	87,26	12,04	7,02	7.065,05

Sumber: Data Kemendagri dan DAPODIK - Kemendikbud

Berdasarkan data dalam tabel diatas, dapat diketahui bahwa di kawasan adat Domberay terjadi kekurangan ketersediaan fasilitas layanan pendidikan sebanyak 530 buah ssekolah (39%), dan hanya 61 % jumlah kampung yang tersedia fasilitas layanan pendidikan SD. Adapun kabupaten yang paling banyak kekurangan fasilitas layanan pendidikan adalah Kabupaten Teluk Bintuni (1630 dan Kabupaten Pegunungan Arfak sebanyak 122 sekolah. Sementara kabupaten/kota yang memiliki ketersediaan fasilitas layanan pendidikan SD terbanyak ada di Kota Sorong dengan rata-rata setiap kampung terdapat 2,32 sekolah SD,

Dari sisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan IPM di kawasan adat Domberay sebesar 60,68 dan terdapat kesenjangan yang tajam antara daerah dengan IPM tertinggi yaitu Kota Sorong (76,33) dengan daerah dengan IPM terendah yaitu Kabupaten Tambrau (50,35). Hal ini konsisten dengan angka Melek Huruf (AMH) di kawasan adat Domberay yang mencapai 87,26 terjadi kesenjangan antara daerah dengan ketersediaan fasilitas layanan pendidikan yang mencukupi dan IPM tertinggi yaitu kota sorong yang sebesar 99,71 dengan kabupaten dengan fasilitas layanan pendidikan dasar yang rendah yaitu Kabupaten Tambrauw yang sebesar 77,72.

Dari sisi angka harapan lama sekolah di kawasan adat Domberay yang sebesar 12,04 tahun juga memiliki perbedaan yang signifikan antara daerah dengan IPM tertinggi yaitu kota Sorong yang mencapai 14 tahun dengan kabupaten yang memiliki IPM terendah yaitu Kabupaten Tambrauw pada angka HLS (10,89) tahun. Sementara dari sisi rata-rata lama sekolah (RLS) di kawasan adat Domberay menunjukkan angka 7,02 tahun, juga menunjukkan perbedaan yang signifikan antara daerah maju dengan IPM tertinggi yaitu Kota Sorong yang mencapai 10,91 tahun dengan kabupaten dengan IPM terendah yaitu Kabupaten Tambrauw yang mencapai angka RLS yang hanya 4,70.

Dilihat dari income per capita penduduk di kawasan Domberay yang mencapai 7.065.050 , banyak dipengaruhi oleh capaian kinerja yang diraih oleh daerah yang paling maju dengan IPM tertinggi yaitu kota Sorong yang income per capita-nya mencapai 12.589.900, dibandingkan kinerja capaian income per capita kabupaten dengan Income per capita terendah yaitu kabupaten 4.431.460. Dilihat dari ketersebaran fasilitas pendidikan SMP dan SMA & SMK di Kawasan Adat Domberay menunjukkan gambaran seperti dalam tabel 6 dibawah ini.

Tabel 6. Sebaran fasilitas layanan pendidikan SMP dan SMA & SMK

Kabupaten/Kota	\sum Distrik	\sum SMP	\sum SMP- \sum distrik	\sum SMP: \sum distrik	\sum SMA & SMK	\sum SMA & SMK- \sum distrik	\sum SMA & SMK: \sum distrik
<u>Sorong</u>	30	42	12	1,4	25	-5	0,83
<u>Manokwari</u>	9	37	28	4,11	23	14	2,56
<u>Sorong Selatan</u>	15	18	3	1,20	7	-8	0,47
<u>Raja Ampat</u>	24	31	7	1,29	20	-4	0,83
<u>Teluk Bintuni</u>	24	32	8	1,33	16	-8	0,67

<u>Teluk Wondama</u>	13	14	1	1,08	5	-8	0,38
<u>Tambrauw</u>	29	14	-15	0,48	8	-21	0,28
<u>Maybrat</u>	24	12	-12	0,50	4	-20	0,17
<u>Manokwari Selatan</u>	6	8	2	1,33	6	0	1,00
<u>Pegunungan Arfak</u>	10	14	4	1,40	8	-2	0,80
<u>Kota Sorong</u>	10	30	20	3,00	34	24	3,40
WA Domberay	194	252	58	1,30	172	-22	0,89

Sumber : Data Kemendagri dan Data DAPODIK diolah

Berdasarkan data dalam tabel di atas, dapat diketahui bahwa di wilayah adat Domberay kabupaten yang distriknya belum ada fasilitas layanan pendidikan SMP adalah Kabupaten Tambrauw (15 distrik) dan kabupaten Maybrat (12 distrik). Kedua kabupaten tersebut adalah kabupaten pemekaran baru yang belum banyak terbangun fasilitas layanan dasarnya. Sementara secara agregat di Wilayah adat Domberay sebenarnya sudah kelebihan fasilitas layanan pendidikan SMP dengan rata-rata setiap distrik terdapat 1,3 sekolah SMP.

Sementara untuk jenjang pendidikan SMA dan SMK menunjukkan secara agregat ada 11% distrik yang belum ada fasilitas layanan pendidikan SMA & SMK (22 distrik), sementara apabila dilihat lebih dalam data kabupaten menunjukkan ada 4 kabupaten yang sebagian distriknya belum tersedia fasilitas pendidikan SMA & SMK yaitu Kabupaten Sorong selatan 47% (8 distrik), Kabupaten Teluk Wondama 38% (8 distrik), Kabupaten Tambrauw 28% (21 kabupaten) dan Kabupaten Maybrat 17% (20 distrik), Sementara kabupaten yang berlebihan fasilitas layanan pendidikan SMA & SMK adalah kota Sorong 340%/distrik (24 sekolah), dan kabupaten Manokwari 256%/distrik (14 sekolah). Dilihat dari ketersediaan guru SD, SMP dan SMA & SMK di wilayah adat Domberay menunjukkan gambaran seperti dalam Tabel dibawah ini

Tabel 7. Rata-Rata Ketersediaan Guru di berbagai jenjang pendidikan di setiap sekolah di Kawasan Adat Domberay

Kab./Kota	Σ Guru SD	Σ Guru SMP	Σ Guru SMA&SMK	Σ SD	Σ SMP	Σ SMA & SMK	Σ Guru SD: Σ SD	Σ Guru SMP: Σ SMP	Σ Guru SMA&SMK: Σ SMA&SMK
Kota Sorong	1.135	534	754	72	30	34	15,76	17,8	22,18
Manokwari	1.174	548	588	113	37	23	10,39	14,81	25,57
Sorong	894	421	398	126	42	25	7,10	10,02	15,92
Teluk Bintuni	545	330	221	75	32	16	7,27	10,31	13,81
Raja Ampat	456	289	282	105	31	20	4,34	9,32	14,10
Sorong Selatan	516	263	186	83	18	7	6,22	14,61	26,57
Teluk Wondama	338	138	100	52	14	5	6,50	9,86	20,00
Maybrat	263	139	79	59	12	4	4,46	11,58	19,75
Tambrauw	269	125	67	53	14	8	5,08	8,93	8,38
Pegunungan Arfak	219	106	97	57	14	8	3,84	7,57	12,13
Manokwari Selatan	209	92	99	33	8	6	6,33	11,50	16,50
WA Domberay	6.018	2.985	2871	828	252	156	7,03	11,48	17,72

Sumber: Data Dapodik-Kemendikbud, diolah

Berdasarkan data dalam tabel di atas nampak bahwa secara agregat jumlah guru di wilayah adat Domberay menunjukkan rata-rata setiap SD terdapat sejumlah 7,03 orang guru, sementara setiap SMP rata-rata terdapat 11,48 guru, dan rata-rata setiap SMA & SM terdapat 17,72 guru. Berdasarkan data tersebut menunjukkan rata-rata guru disetiap jenjang pendidikan sudah mendekati jumlah ideal untuk SD dan SMP, dan ideal untuk jenjang pendidikan SMA & SMK.

Akan tetapi apabila dilihat lebih mendalam menunjukkan jumlah guru berlebihan untuk jenjang SD, SMP dan SMA & SMK ada di Kota Sorong dan Kabupaten Manokwari sementara kabupaten lainnya mengalami kekurangan jumlah guru di jenjang SD diantaranya di kabupaten Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Maybrat, Tambrau, Manokwari Selatan, Teluk Wondama, Sorong Selatan, Teluk Bintuni dan Sorong.

Dan, untuk jenjang SMP menunjukkan rata-rata jumlah guru SMP disetiap sekolah yang berlebih hanya ada di Kota Sorong dan Manokwari sudah mendekati ideal, sementara kabupaten lainnya mengalami kekurangan guru SMP, dengan kabupaten yang mengalami guru terparah ada di Kabupaten Pegunungan Arfak. Sementara untuk jenjang pendidikan SMA & SMK menunjukkan kondisi hampir semua sekolah di kawasan adat Domberay mengalami kelebihan guru kecuali di Kabupaten Pegunungan Arfak, Tambrau dan Teluk Bintuni yang mengalami kekurangan guru

Gambaran diatas menunjukkan adanya ketidakmerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan hasil-hasil pembangunan khususnya di bidang pendidikan dasar di kawasan adat Domberay, untuk itu kedepan direkomendasikan kepada pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah nasional, khususnya kementerian pendidikan dan kebudayaan untuk lebih memperhatikan dan menipiskan kesenjangan yang terjadi di kawasan adat Domberay. Dilihat dari ketersebaran sekolah dan tenaga pengajar di wilayah adat Domberay menunjukkan gambaran seperti yang ada didalam tabel dibawah ini

Tabel 8. Sebaran Sekolah dan Tenaga Pengajar Wilayah Adat Domberay

Wilayah Adat	\sum Murid SD	\sum Murid SMP	\sum Murid SMA & SMK	\sum Guru SD	\sum Guru SMP	\sum Guru SMA&SMK	$\frac{\sum \text{Murid}}{\sum \text{Guru}}$ SD	$\frac{\sum \text{Murid}}{\sum \text{Guru}}$ SMP	$\frac{\sum \text{Murid}}{\sum \text{Guru}}$ SMA & SMK
Kota Sorong	23.305	9.543	10.606	1.135	534	754	21	18	14,07
Manokwari	22.793	8.553	7.790	1.174	548	588	19	16	13,25
Sorong	13.959	4.891	4.239	894	421	398	16	12	10,65
Teluk Bintuni	10.293	3.370	13.663	545	330	221	19	10	61,82
Raja Ampat	9.770	3.075	12.845	456	289	282	21	11	45,55
Sorong Selatan	9.582	2.650	1.823	516	263	186	19	10	9,80
Teluk Wondama	5.290	1.924	1116	338	138	100	16	14	11,16
Pegunungan Arfak	5.340	1.258	553	219	106	97	24	12	5,70
Maybrat	4.374	1.038	517	263	139	79	17	7	6,54
Tambrau	4.180	1.140	573	269	125	67	16	9	8,55
Manokwari Selatan	2.919	1.187	823	209	92	99	14	13	8,31
WA Domberay	111.805	38.629	54.548	6.018	2.985	2.871	19	13	19,00

Sumber: Dapodik-Kemendikbud tahun 2017

Berdasarkan data dalam tabel diatas menunjukkan gambaran rasio murid dan guru di kawasan adat Domberay menunjukkan kondisi secara agregat sudah ideal untuk jenjang pendidikan SD dan SMP dan belum ideal untuk jenjang pendidikan SMA & SMK. Dan apabila kita

perdalam ke masing masing kabupaten menunjukkan kondisi rata-rata perbandingan murid dan guru untuk jenjang SD di semua kabupaten adalah sudah ideal, sementara untuk jenjang SMP juga menunjukkan kondisi yang sangat ideal /Berlebihan jumlah guru di kabupaten Maybrat (7 siswa/1 guru) dan Tambrau (9 siswa/1 guru).

Sementara untuk jenjang pendidikan SMA & SMK menunjukkan kondisi yang sangat heterogen dimana sebagian kabupaten menunjukkan kondisi yang sudah berlebihan rasio guru dan murid sementara beberapa kabupaten lainnya menunjukkan terjadi kekurangan guru. Kabupaten yang sudah ideal rasio guru dan muridnya untuk jenjang SMA & SMK adalah kota Sorong, kabupaten Manokwari, Sorong Selatan, Teluk Wondama. Dan, kabupaten yang berlebihan rasio murid dan guru adalah Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Teluk Wondama, Pegunungan Arfak, Maybrat, Tambahrau, Manokwari Selatan. Dan, kabupaten yang menunjukkan rasio murid dan guru yang menunjukkan kekurangan guru ada di kabupaten Teluk Bintuni (61, 82 murid/1 orang guru) dan kabupaten Raja Ampat 45,55 murid/1 orang guru).

IPM di kawasan adat Domberay sebesar 60,68 dan terdapat kesenjangan yang tajam antara daerah dengan IPM tertinggi yaitu Kota Sorong (76,33) dengan daerah dengan IPM terendah yaitu kabupaten Tambrau (50,35). Hal ini konsisten dengan angka Melek Huruf (AMH) di kawasan adat Domberay yang mencapai 87,26 terjadi kesenjangan antara daerah dengan ketersediaan fasilitas layanan pendidikan yang mencukupi dan IPM tertinggi yaitu Kota Sorong yang sebesar 99,71 dengan kabupaten dengan fasilitas layanan pendidikan dasar yang rendah yaitu Kabupaten Tambrau yang sebesar 77,72.

Dari sisi angka harapan lama sekolah di kawasan adat Domberay yang sebesar 12,04 tahun juga memiliki perbedaan yang signifikan antara daerah dengan IPM tertinggi yaitu kota Sorong yang mencapai 14 tahun dengan kabupaten yang memiliki IPM terendah yaitu Kabupaten Tambrau pada angka HLS (10,89) tahun. Sementara dari sisi rata-rata lama sekolah (RLS) di kawasan adat Domberay menunjukkan angka 7,02 tahun, juga menunjukkan perbedaan yang signifikan antara daerah maju dengan IPM tertinggi yaitu kota Sorong yang mencapai 10,91 tahun dengan kabupaten dengan IPM terendah yaitu Kabupaten Tambrau yang mencapai angka RLS yang hanya 4,70.

Dilihat dari income per capita penduduk di kawasan Domberay yang mencapai 7.065.050 , banyak dipengaruhi oleh capaian kinerja yang diraih oleh daerah yang paling maju dengan IPM tertinggi yaitu kota Sorong yang income percapita-nya mencapai 12.589.900, dibandingkan kinerja capaian income per capita kabupaten dengan income per capita terendah yaitu kabupaten 4.431.460.

Kondisi diatas dipengaruhi di kawasan adat Domberay terjadi kekurangan ketersediaan fasilitas layanan pendidikan sebanyak 530 buah ssekolah (39%), dan hanya 61 % jumlah kampung yang tersedia fasilitas layanan pendidikan SD. Adapun Kabupaten yang paling banyak kekurangan fasilitas layanan pendidikan adalah kabupaten Teluk Bintuni (1630 dan kabupaten Pegunungan Arfak sebanyak 122 sekolah. Sementara kabupaten/kota yang memiliki ketersediaan fasilitas layanan pendidikan SD terbanyak ada di Kota Sorong dengan rata-rata setiap kampung terdapat 2,32 sekolah SD.

Dan, di wilayah adat Domberay kabupaten yang distriknya belum ada fasilitas layanan pendidikan SMP adalah Kabupaten Tambrau (15 distrik) dan kabupaten Maybrat (12 distrik). Kedua kabupaten tersebut adalah kabupaten pemekaran baru yang belum banyak terbangun fasilitas layanan dasarnya. Sementara secara agregat di Wilayah adat Domberay sebenarnya sudah kelebihan fasilitas layanan pendidikan SMP dengan rata-rata setiap distrik terdapat 1,3 sekolah SMP.

Sementara untuk jenjang pendidikan SMA dan SMK menunjukkan secara agregat ada 11% distrik yang belum ada fasilitas layanan pendidikan SMA & SMK (22 distrik), sementara apabila dilihat lebih dalam data kabupaten menunjukkan ada 4 kabupaten yang sebagian distriknya belum tersedia fasilitas pendidikan SMA & SMK yaitu Kabupaten Sorong selatan 47% (8 distrik), kabupaten Teluk Wondama 38% (8 distrik), Kabupaten Tambrau 28% (21 kabupaten) dan Kabupaten Maybrat 17% (20 distrik), Sementara kabupaten yang berlebihan fasilitas layanan pendidikan SMA & SMK adalah Kota Sorong 340% per distrik (24 sekolah), dan Kabupaten Manokwari 256% per distrik (14 sekolah).

Sementara secara agregat jumlah guru di wilayah adat Domberay menunjukkan rata-rata setiap SD terdapat sejumlah 7,03 orang guru, sementara setiap SMP rata-rata terdapat 11,48 guru, dan rata-rata setiap SMA & SM terdapat 17,72 guru. Berdasarkan data tersebut

menunjukkan rata-rata guru disetiap jenjang pendidikan sudah mendekati jumlah ideal untuk SD dan SMP, dan ideal untuk jenjang pendidikan SMA & SMK.

Akan tetapi apabila dilihat lebih mendalam menunjukkan jumlah guru berlebihan untuk jenjang SD, SMP dan SMA & SMK ada di kota Sorong dan Kabupaten Manokwari sementara kabupaten lainnya mengalami kekurangan jumlah guru di jenjang SD diantaranya di Kabupaten Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Maybrat, Tambrauw, Manokwari Selatan, Teluk Wondama, Sorong Selatan, Teluk Bintuni dan Sorong.

Dan, untuk jenjang SMP menunjukkan rata-rata jumlah guru SMP disetiap sekolah yang berlebih hanya ada di kota Sorong dan Manokwari sudah mendekati ideal, sementara kabupaten lainnya mengalami kekurangan guru SMP, dengan kabupaten yang mengalami guru terparah ada di kabupaten pegunungan arfak. Sementara untuk jenjang pendidikan SMA & SMK menunjukkan kondisi hampir semua sekolah di kawasan adat Domberay mengalami kelebihan guru kecuali di kabupaten Pegunungan Arfak, Tambrauw dan Teluk Bintuni yang mengalami kekurangan guru.

Gambaran diatas menunjukkan adanya ketidakmerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan hasil-hasil pembangunan khususnya di bidang pendidikan dasar di kawasan adat Domberay, untuk itu kedepan direkomendasikan kepada pemerintah Provinsi Papua Barat dan pemerintah nasional, khususnya kementerian pendidikan dan kebudayaan untuk lebih memperhatikan dan menipiskan kesenjangan yang terjadi di kawasan adat Domberay.

Dan, sebagai gambaran rasio murid dan guru di kawasan adat Domberay menunjukkan kondisi secara agregat sudah ideal untuk jenjang pendidikan SD dan SMP dan belum ideal untuk jenjang pendidikan SMA & SMK. Dan apabila kita perdalam ke masing masing kabupaten menunjukkan kondisi rata-rata perbandingan murid dan guru untuk jenjang SD di semua kabupaten adalah sudah ideal, sementara untuk jenjang SMP juga menunjukkan kondisi yang sangat ideal/berlebihan jumlah guru di kabupaten Maybrat (7 siswa/1 guru) dan Tambrauw (9 siswa/1 guru).

Sementara untuk jenjang pendidikan SMA & SMK menunjukkan kondisi yang sangat heterogen dimana sebagian kabupaten menunjukkan kondisi yang sudah berlebihan rasio guru dan murid sementara beberapa kabupaten lainnya menunjukkan terjadi kekurangan guru. Kabupaten yang sudah ideal rasio guru dan muridnya unjuk jenjang SMA & SMK adalah kota Sorong, kabupaten Manokwari, Sorong Selatan, Teluk Wondama. Dan, kabupaten yang berlebihan rasio murid dan guru adalah kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Teluk Wondama, Pegunungan Arfak, Maybrat, Tambrauw, Manokwari Selatan. Dan, kabupaten yang menunjukkan rasio murid dan guru yang menunjukkan kekurangan guru ada di kabupaten Teluk bintuni (61, 82 murid/1 orang guru) dan kabupaten Raja Ampat 45,55 murid/1 orang guru)

2. Wilayah Adat Bomberay

Wilayah adat Bomberay terletak di Provinsi Papua Barat yang merupakan wilayah kepulauan, pesisir dan pegunungan. Jumlah penduduk di wilayah ini adalah sebanyak 333.842 jiwa. Wilayah adat ini hanya memiliki dua Kabupaten yaitu Fakfak dan Kaimana. Sektor unggulan yang terdapat di wilayah ini berupa ikan, hasil laut lainnya, peternakan sapi, pala, rumput laut dan pariwisata.

Dilihat dari ketersediaan fasilitas layanan pendidikan dasar (SD), di setiap Kampung, IPM, HLS, RLS dan income per kapita di wilayah adat Bomberay menunjukkan gambaran seperti tabel dibawah ini.

Tabel 9. Ketersediaan Fasilitas Pendidikan Dasar, IPM, AMH, HLS, RLS dan Income *per capita* di wilayah adat Bomberay

Kabupaten/Kota	Kampung	\sum SD	\sum SD - \sum Kampung	\sum SD : \sum Kampung	IPM 2016	AMH 2013	HLS 2016	RLS 2016	Income/ kapita 2015
Fakfak	123	114	9	0,93	65,55	99,12	13,61	8,22	6795,92
Kaimana	86	85	1	0,99	62,15	97,49	11,46	7,83	7340,72
WA Bomberay	209	199	-10	0,95	63,85	98,31	12,54	8,03	7068,32

Sumber: Data Kemendagri, DAPODIK dan BPS diolah

Berdasarkan data dalam tabel di atas dapat diketahui secara agregat kampung-kampung di wilayah adat Bomberay hampir seluruhnya sudah tersedia fasilitas layanan pendidikan SD ((5%) dan hanya 5% kampung yang ada di wilayah adat Bomberay yang belum tersedia fasilitas pendidikan SD, yang tersebar di Kabupaten Fakfak 9 kampung (7%) dan Kabupaten Kaimana 1 kampung (1%).

Sementara dari sisi capaian Indeks Pembangunan Manusia dengan model perhitungan terbaru menunjukkan secara agregat IPM di kawasan adat Bomberay adalah 63,85 dengan angka melek Huruf (AMH) sebesar 98,31 %, harapan lama sekolah (HLS) sebesar 12,54 tahun, rata-rata lama sekolah (RLS) sebesar 8,03 tahun dan income per capita sebesar 7.068.320 rupiah.

Apabila dilihat lebih dalam ke data kabupaten menunjukkan IPM Fakfak lebih tinggi dengan angka 65,55 dibanding IPM Kabupaten Kaimana yang sebesar 62,15 sementara AMH Kabupaten Fakfak juga lebih tinggi sebesar 99,12% dibandingkan Kabupaten Kaimana yang sebesar 97,49%. Demikian juga halnya HLS Kabupaten Fakfak mencapai 13,61 tahun dibandingkan dengan Kabupaten Kaimana yang sebesar 11,46 tahun, dan RLS Kabupaten Fakfak sebesar 8,22 tahun lebih tinggi dibandingkan RLS kabupaten Kaimana yang sebesar 7,83 tahun. Meskipun dari sisi capaian income per capita Kabupaten Fakfak yang mencapai 6,795, 920 rupiah lebih rendah dibanding income per capita Kabupaten Kaimana yang sebesar 7,340, 720 rupiah.

Dilihat dari ketersediaan fasilitas layanan pendidikan SMP dan SMA & SMK di kawasan adat Bomberay menunjukkan gambaran seperti dalam tabel dibawah ini.

Tabel 10. Ketersediaan Fasilitas layanan Pendidikan SMP dan SMA & SMK di setiap Distrik di Kawasan Adat Bomberay

Kab./Kota	Σ Distrik	Σ SMP	Σ SMP- Σ distrik	Σ SMP: Σ distrik	Σ SMA & SMK	Σ SMA & SMK- Σ distrik	Σ SMA & SMK: Σ distrik
<u>Fakfak</u>	17	20	3	1,18	9	-8	0,53
<u>Kaimana</u>	7	17	10	2,43	7	0	1,00
WA Bomberay	24	37	13	1,54	16	-8	0,67

Sumber: Data Kemendagri dan Dapodik diolah

Berdasarkan data dalam tabel diatas menunjukkan secara agregat jumlah SMP di kabupaten berlebih dimana rata-rata setiap distrik terdapat 1,54 sekolah (13 sekolah), sementara dari sisi fasilitas pendidikan SMA & SMK menunjukkan adanya kekurangan sebesar 33% (8 sekolah).

Dan, apabila dicermati lebih dalam menampakkan kondisi ketersediaan fasilitas layanan pendidikan SMP di Kabupaten Fakfak mengalami kelebihan 18 % (3 sekolah) sementara di Kabupaten Kaimana mengalami kelebihan sebesar 143% (10 sekolah), sementara ketersediaan fasilitas pendidikan SMA & SMK di Kabupaten Fakfak menunjukkan adanya kekurangan sebanyak 8 distrik yang belum ada fasilitas pendidikan SMA & SMK dan di Kabupaten Kaimana secara agregat menunjukkan setiap distrik sudah memiliki ketersediaan fasilitas layanan pendidikan SMA dan SMK. Dilihat dari ketersebaran guru di setiap jenjang pendidikan di kawasan adat Bomberay menunjukkan gambaran seperti dalam Tabel dibawah ini.

Tabel 11. Rata-Rata Ketersediaan Guru disetiap Jenjang Pendidikan di kawasan Adat Bomberay

Kab./Kota	Σ Guru SD	Σ Guru SMP	Σ Guru SMA&SMK	Σ SD	Σ SMP	Σ SMA & SMK	Σ Guru SD: Σ SD	Σ Guru SMP: Σ SMP	Σ Guru SMA & SMK: Σ SMA&SMK
Fak-Fak	975	371	279	114	20	9	8,55	18,55	31,00

Kaimana	537	223	192	85	17	7	6,32	13,12	27,43
WA Bomberay	1512	594	471	199	37	16	7,44	15,83	29,21

Sumber : Data Dapodik – Kemendikbud diolah

Berdasarkan dalam tabel diatas menunjukkan bahwa secara agregat dengan menafikan kualifikasi guru yang ada menunjukkan rata-rata jumlah guru disetiap SD di kawasan adat Bomberay sudah mendekati ideal sementara untuk rata-rata guru SMP sudah ideal dan untuk guru SMA & SMK sangat berlebihan. Dan, apabila lebih mendalam ke data setiap kabupaten menunjukkan keadaan guru SD Kabupaten Fakfak sudah hampir ideal (8,55 orang) dibanding Kabupaten Kaimana yang masih agak jauh dari angka ideal (6,32 orang). Hal ini menunjukkan di Kabupaten Kaimana masih membutuhkan guru SD sudah mencapai tataran angka yang ideal di setiap sekolahnya.

Untuk jenjang pendidikan SMP menunjukkan Kabupaten Fakfak memiliki rata-rata jumlah guru di setiap sekolah yang melebihi jumlah ideal (18,55), sementara di Kabupaten Kaimana secara agregat menunjukkan kondisi yang masih belum ideal (13,12 orang). Dan, untuk jenjang pendidikan SMA & SMK menunjukkan gambaran secara agregat rata-rata guru disetiap sekolah melebihi jumlah yang ideal/Berlebihan, baik itu di Kabupaten Fakfak maupun di Kabupaten Kaimana.

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pendidikan masyarakat sekitar wilayah adat Bomberay maka perlu adanya sekolah atau lembaga yang focus terhadap sektor unggulan yang terdapat di wilayah adat ini, misalnya dengan adanya sekolah perikanan, peternakan dan pariwisata. Sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan kesejahteraan warga sekitar.

Tabel 12. Sebaran Sekolah dan Tenaga Pengajar Wilayah Adat Bomberay

Wilayah Adat	\sum Murid SD	\sum Murid SMP	\sum Murid SMA & SMK	\sum Guru SD	\sum Guru SMP	\sum Guru SMA&SM K	\sum Muri d : \sum Guru SD	\sum Muri d : \sum Guru SMP	\sum Murid : \sum Guru SMA & SMK
Fak-Fak	10.743	3.890	3022	975	371	279	11,02	13,94	10,83
Kaimana	9.167	2.941	2.193	537	223	192	17,07	13,19	11,42
WA Bomberay	19.910	6.831	5.215	1512	594	471	13,17	11,50	11,07

Sumber: BPS, 2016

Rasio murid dan guru di kawasan adat Bomberay menunjukkan kondisi untuk jenjang SD dengan angka rasio sebesar 13,17 menunjukkan kondisi yang sudah melebihi ideal yang rasionya sebesar 20. Dan, apabila dilihat lebih mendalam ke setiap kabupaten menunjukkan kondisi yang sama ideal dalam rentang 11,02 (kab. Fakfak) dengan 17,07 (Kab. Kaimana).

Sementara untuk jenjang pendidikan SMP menunjukkan kondisi rasio siswa dan guru sebesar 11,50 menunjukkan kondisi yang melebihi rasio yang ideal 20. Hal ini apabila dilihat lebih mendalam data setiap kabupaten menunjukkan kondisi yang melebihi kondisi ideal untuk Kabupaten Kaimana (13,19) dan Kabupaten Fakfak (13,94).

Dan, untuk jenjang SMA & SMK menunjukkan kondisi rasio murid dan guru di kawasan adat bomberay yang sebesar 11,07 melebihi ambang ideal, dengan angka rasio sebesar 11,07 jauh melebihi angka rasio ideal yang 20 siswa setiap guru. Dan apabila dilihat lebih mendalam ke data setiap kabupaten menunjukkan kondisi yang hampir sama dimana Kabupaten Fakfak (10,83) dan Kabupaten Kaimana (11,42).

Berdasarkan data dan uraian diatas maka dapat diketahui Secara agregat IPM di kawasan adat Bomberay adalah 63,85 dengan angka melek Huruf (AMH) sebesar 98,31%, harapan lama sekolah (HLS) sebesar 12,54 tahun, rata-rata lama sekolah (RLS) sebesar 8,03 tahun dan income per capita sebesar 7.068,320 rupiah.

Apabila dilihat lebih dalam ke data kabupaten menunjukkan IPM Fakfak lebih tinggi dengan angka 65,55 dibanding IPM Kabupaten Kaimana yang sebesar 62,15 sementara AMH Kabupaten Fakfak juga lebih tinggi sebesar 99,12% dibandingkan Kabupaten Kaimana yang sebesar 97,49%. Demikian juga halnya HLS Kabupaten Fakfak mencapai 13,61 tahun dibandingkan dengan Kabupaten Kaimana yang sebesar 11,46 tahun, dan RLS Kabupaten Fakfak sebesar 8,22 tahun lebih tinggi dibandingkan RLS kabupaten Kaimana yang sebesar 7,83 tahun. Meskipun dari sisi capaian income per capita Kabupaten Fakfak yang mencapai 6,795, 920 rupiah lebih rendah dibanding income per capita Kabupaten Kaimana yang sebesar 7,340, 720 rupiah.

Kondisi di atas dari sisi tinjauan pendidikan dipengaruhi oleh secara agregat kampung-kampung di wilayah adat Bomberay hampir seluruhnya sudah tersedia fasilitas layanan pendidikan SD ((5%) dan hanya 5% kampung yang ada di wilayah adat Bomberay yang belum tersedia fasilitas pendidikan SD, yang tersebar di Kabupaten Fakfak 9 kampung (7%) dan Kabupaten Kaimana 1 kampung (1%). Dan, secara agregat jumlah SMP di kabupaten berlebihan dimana rata-rata setiap distrik terdapat 1,54 sekolah (13 sekolah), sementara dari sisi fasilitas pendidikan SMA & SMK menunjukkan adanya kekurangan sebesar 33% (8 sekolah).

Dan, apabila dicermati lebih dalam menampakkan kondisi ketersediaan fasilitas layanan pendidikan SMP di Kabupaten Fakfak mengalami kelebihan 18 % (3 sekolah) sementara di Kabupaten Kaimana mengalami kelebihan sebesar 143% (10 sekolah), sementara ketersediaan fasilitas pendidikan SMA & SMK di Kabupaten Fakfak menunjukkan adanya kekurangan sebanyak 8 distrik yang belum ada fasilitas pendidikan SMA & SMK dan di Kabupaten Kaimana secara agregat menunjukkan setiap distrik sudah memiliki ketersediaan fasilitas layanan pendidikan SMA dan SMK.

Secara agregat dengan menafikan kualifikasi guru yang ada menunjukkan rata-rata jumlah guru disetiap SD di kawasan adat Bomberay sudah mendekati ideal sementara untuk rata-rata guru SMP sudah ideal dan untuk guru SMA & SMK sangat berlebihan. Dan, apabila lebih mendalam ke data setiap kabupaten menunjukkan keadaan guru SD Kabupaten Fakfak sudah hampir ideal (8,55 orang) dibanding Kabupaten Kaimana yang masih agak jauh dari angka ideal (6,32 orang). Hal ini menunjukkan di Kabupaten Kaimana masih membutuhkan guru SD sudah mencapai tataran angka yang ideal di setiap sekolahnya.

Untuk jenjang pendidikan SMP menunjukkan Kabupaten Fakfak memiliki rata-rata jumlah guru di setiap sekolah yang melebihi jumlah ideal (18,55), sementara di Kabupaten Kaimana secara agregat menunjukkan kondisi yang masih belum ideal (13,12 orang). Dan, untuk jenjang pendidikan SMA & SMK menunjukkan gambaran secara agregat rata-rata guru disetiap sekolah melebihi jumlah yang ideal/berlebihan, baik itu di Kabupaten Fakfak maupun di Kabupaten Kaimana.

Rasio murid dan guru di kawasan adat Bomberay menunjukkan kondisi untuk jenjang SD dengan angka rasio sebesar 13,17 menunjukkan kondisi yang sudah melebihi ideal yang rasionya sebesar 20. Dan, apabila dilihat lebih mendalam ke setiap kabupaten menunjukkan kondisi yang sama ideal dalam rentang 11,02 (kab. Fakfak) dengan 17,07 (Kab. Kaimana).

Sementara untuk jenjang pendidikan SMP menunjukkan kondisi rasio siswa dan guru sebesar 11,50 menunjukkan kondisi yang melebihi rasio yang ideal 20. Hal ini apabila dilihat lebih mendalam data setiap kabupaten menunjukkan kondisi yang melebihi kondisi ideal untuk Kabupaten Kaimana (13,19) dan Kabupaten Fakfak (13,94).

Dan, untuk jenjang SMA & SMK menunjukkan kondisi rasio murid dan guru di kawasan adat bomberay yang sebesar 11,07 melebihi ambang ideal, dengan angka rasio sebesar 11,07 jauh melebihi angka rasio ideal yang 20 siswa setiap guru. Dan apabila dilihat lebih mendalam ke data setiap kabupaten menunjukkan kondisi yang hampir sama dimana Kabupaten Fakfak (10,83) dan Kabupaten Kaimana (11,42). Dilihat dari ketersebaran kekurangan fasilitas layanan pendidikan SD di Provinsi Papua Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini,

Tabel 13. Sebaran Kabupaten/Kota yang Kekurangan Fasilitas Layanan Pendidikan SD di Provinsi Papua Barat

Kab./Kota	Kampung	\sum SD	\sum SD - \sum Kampung
Fakfak	123	114	9

Kaimana	86	85	1
Teluk Wondama	77	52	25
Teluk Bintuni	238	75	163
Manokwari	160	113	47
Sorong Selatan	121	83	38
Sorong	141	126	15
Raja Ampat	121	105	16
Tambrauw	76	53	23
Maybrat	157	59	98
Manokwari Selatan	57	33	24
Peg. Arfak	179	57	122
Kota Sorong	31	72	-41
Papua Barat	1567	1027	540

Sumber: Data Kemendagri dan Dapodik-Kemendikbud Diolah

Dan, untuk jenjang SMP ketersebarang kekurangan fasilitas layanan pendidikan SMP di Provinsi Papua Barat nampak seperti dalam tabel dibawah ini.

Tabel 14. Sebaran Kabupaten/Kota yang Kekurangan Fasilitas Layanan Pendidikan SMP di Provinsi Papua Barat

Kabupaten/Kota	Σ Distrik	Σ SMP	Σ SMP- Σ distrik
Sorong	30	42	12
Manokwari	9	37	28
Fakfak	17	20	3
Sorong Selatan	15	18	3
Raja Ampat	24	31	7
Teluk Bintuni	24	32	8
Teluk Wondama	13	14	1
Kaimana	7	17	10
Tambrauw	29	14	-15
Maybrat	24	12	-12
Manokwari Selatan	6	8	2
Peg. Arfak	10	14	4

Tabel 15. Sebaran Kabupaten/Kota yang Kekurangan Fasilitas Layanan Pendidikan SMA & SMK di Provinsi Papua Barat

Kabupaten/Kota	Σ Distrik	Σ SMA & SMK	Σ SMA & SMK- Σ distrik
Sorong	30	25	-5
Manokwari	9	23	14
Fakfak	17	9	-8
Sorong Selatan	15	7	-8
Raja Ampat	24	20	-4
Teluk Bintuni	24	16	-8
Teluk Wondama	13	5	-8
Kaimana	7	7	0
Tambrauw	29	8	-21
Maybrat	24	4	-20
Manokwari Selatan	6	6	0
Peg. Arfak	10	8	-2
Kota Sorong	10	34	24
Papua Barat	218	172	46

Sumber: Data Kemendagri dan Dapodik-Kemendikbud Diolah

Berdasarkan data data yang dipaparkan diatas dapat diketahui bahwa untuk meningkatkan kinerja pembangunan berupa peningkatan IPM Provinsi Papua Barat dari sisi Pendidikan diperlukan investasi pemerintah untuk melengkapi kekurangan fasilitas layanan pendidikan diberbagai jenjang pendidikan serta perekrutan guru diberbagai jenjang pendidikan, agar memenuhi standar ideal yang ditetapkan oleh kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pada saat ini, fasilitas layanan pendidikan sekolah dasar (SD) terdapat dari 1.567 kampung di Provinsi Papua Barat, terdapat 540 kampung yang belum memiliki fasilitas layanan pendidikan SD. Dan, dari 218 distrik yang ada di Provinsi Papua Barat, terdapat 71 Distrik yang belum memiliki Fasilitas layanan Pendidikan SMP. Disamping itu dari 218 distrik di Provinsi Papua Barat, terdapat 22 distrik yang belum memiliki fasilitas layanan pendidikan SMA & SMK .

Dari sisi tenaga pendidik (Guru) dengan menafikan kurangnya fasilitas layanan pendidikan di berbagai jenjang pendidikan menunjukkan kondisi untuk jenjang SD, SMP dan SMA & SMK menunjukkan rasio sekolah dan guru menunjukkan kondisi yang sudah mencukupi.

Dari sisi rasio jumlah murid dan guru menunjukkan agar mencapai rasio yang ideal antara jumlah murid dan guru SD di Provinsi Papua Barat, dimana jumlah murid SD sebanyak 131 715 dengan rata-rata rasio jumlah murid dan guru ideal untuk SD sebanyak 20 orang murid per satu orang guru maka dibutuhkan jumlah guru sebanyak 6.586 orang guru, sementara jumlah guru SD yang ada sebanyak 1.512 orang guru, maka kekurangan guru SD untuk mencapai rasio ideal jumlah murid dan jumlah guru SD sebanyak 5.074 orang guru. Sementara rasio jumlah murid dan jumlah guru untuk jenjang pendidikan SMP dan SMA & SMK sudah pada titik sangat ideal.

Dan, apabila kekurangan fasilitas layanan pendidikan SD diperhitungkan menunjukkan kondisi kekurangan guru sebanyak 540 sekolah SD dikalikan jumlah guru ideal setiap sebanyak 9 orang diperoleh jumlah kekurangan guru sebanyak 4.860 orang dan apabila ditambahkan kekurangan guru SD yang ada saat ini sebanyak 5.074 orang, maka jumlah total kekurangan guru SD dengan mempertimbangkan pemenuhan fasilitas layanan pendidikan SD di Provinsi

Papua Barat sebanyak 9.934 orang.

Sementara untuk jenjang SMP, apabila mempertimbangkan kekurangan fasilitas layanan pendidikan SMP yang menunjukkan kekurangan 71 sekolah, dan dengan mempertimbangkan rata-rata jumlah guru SMP setiap sekolah sebanyak 12 orang maka akan dibutuhkan sebanyak 852 orang guru SMP. Dan, untuk jenjang pendidikan SMA & SMK yang menunjukkan adanya kekurangan sekolah sebanyak 46 unit sekolah, dan dengan mempertimbangkan jumlah guru ideal disetiap sekolah SMA & SMK sebanyak 17 orang, maka apabila kekurangan jumlah sekolah SMA & SMK dipenuhi akan terdapat kekurangan guru SMA & SMK sebanyak 782 orang guru.

Untuk mengatasi kondisi tersebut sejauh ini sudah banyak upaya percepatan pembangunan pendidikan yang dilakukan pemerintah kabupaten dan provinsi serta kementerian pendidikan dan kebudayaan. Beberapa upaya yang dilakukan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan diantaranya adalah:

a. Penerima Program Indonesia Pintar (PIP)

PIP adalah program bantuan uang tunai bagi anak usia sekolah dari keluarga pemegang Kartu Sejahtera (KKS) atau yang memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan sebelumnya. Program PIP bertujuan untuk (i) meningkatkan akses bagi anaka usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun; (ii) mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi; dan (iii) menarik siswa putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Lembaga Kursus Pelatihan (LKP)/satuan pendidikan nonformal lainnya dan Balai Latihan Kerja (BLK).

Sejak diluncurkan tahun 2015, Program Indonesia Pintar (PIP) terus membantu meringankan beban personal pendidikan dari anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. Menurut laporan dari bank penyalur, terkait penyaluran dana PIP di Kabupaten Merauke disebutkan bahwa dana PIP tahun 2015 sudah hampir tuntas seluruhnya. Dari total dana Rp10,6 Milyar telah dicairkan sejumlah Rp10,3 Milyar. Sementara untuk dana PIP tahun 2016, telah dicairkan dana sebesar Rp1,6 Milyar dari total Rp4,5 Milyar. Jumlah siswa yang tercatat menerima bantuan PIP adalah sebanyak 358.617 siswa.

b. Sekolah baru berpola asrama

Sekolah berasrama dianggap sangat cocok dengan kondisi geografis di Papua yang tidak semuanya mudah ditembus dan masyarakat yang penyebarannya terpencar-pencar serta terpencil, Pendidikan dengan pola asrama memberikan manfaat sebagai bentuk proses inisiasi (akulturasi) yang sangat efektif. Pelajar yang berasal dari masyarakat tradisional dipisahkan dari sistem tradisionalnya dan diantarkan kedalam sistem nilai modern yang menghargai waktu, disiplin, tanggungjawab, rajin, kerja keras, hidup bersih, kerjasama, menghargai eksistensi setiap individu, solidaritas dan taat terhadap norma agama. Pendidikan berasrama ini memberikan hasil yang optimal karena dilaksanakan memenuhi kriteria komprehensif serta aspek-aspek kompetensi manusia modern yang kognitif, efektif dan juga psikomotorik. Capaian jumlah sekolah baru berpola asrama di tahun 2016 adalah sebanyak 10 sekolah yang tersebar diberbagai wiayah.

c. Sekolah Garis Depan (SGD)

Merupakan pembangunan pendidikan di daerah perbatasan dan terpencil yang sulit untuk mendapatkan akses pendidikan. Program yang menerapkan konsep membangun dari pinggir ini baik secara geografis maupun sosiologis dimulai dengan melakukan revitalisasi terhadap sekolah-sekolah yang sudah ada, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Selain itu juga dilakukan pembangunan sekolah garis depan yang baru. Revitalisasi sekolah dan pembangunan sekolah baru tersebut merupakan kerja sama antara pemerintah pusat (Kemendikbud) dengan daerah provinsi/kabupaten/kota atau swasta/yayasan. Pelaksanaan sekolah garis depan juga merupakan wujud hadirnya daerah di wilayah-wilayah terjauh, terpencil, perbatasan, termiskin dan terendah dalam pembangunan. Program ini memberikan layanan pendidikan terintegrasi mulai dari tingkat dasar hingga menengah, untuk mendukung pelaksanaan wajib belajar 12 tahun. Dengan demikian, diharapkan anak-anak usia sekolah di daerah terluar, terdepan dan

tertinggal (3T) dapat menuntaskan wajib belajar 12 tahun tanpa kesulitan dan memungkinkan anak-anak di seluruh Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang sama.

Dari sisi kurikulum, sekolah garis depan mengadopsi kurikulum nasional yang diperkaya dengan materi yang memperhatikan karakteristik daerah. Selain itu, sistem pembelajaran yang diterapkan juga merujuk pada pembelajaran abad ke-21 dan pembelajaran berkelanjutan. Dengan pembelajaran yang berbasis sumber yang beragam (*resource-based learning*) dan menggunakan berbagai pendekatan (*problem-based, collaborative-based* atau *project-based learning*) tersebut diharapkan menghasilkan lulusan yang menguasai tiga jenis kecakapan, meliputi kecakapan hidup, kecakapan berinovasi, serta kecakapan memanfaatkan teknologi dan media informasi. Dengan dioperasikannya program ini, diharapkan akan memperkecil ketimpangan antar wilayah dari sisi kelayakan, keadilan, pemerataan dan mutu pendidikan.

Untuk keberlangsungan sekolah garis depan ini tentu saja perlu didukung oleh tenaga pengajar yang berkompentensi, antara lain dengan dukungan dari guru garis depan (GGD) serta tenaga pengajar dari program Sekolah Mengajar di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (SM3T). Guru-guru SM3T tersebut memiliki kualifikasi mengajar serta kemampuan beradaptasi dengan daerah yang merupakan garda terdepan. Dengan program ini diharapkan akan memperkecil ketimpangan antar wilayah dari sisi kelayakan, keadilan, pemerataan dan mutu pendidikan.

Capaian jumlah SGD di Papua adalah sebanyak 25 sekolah di tahun 2016.

d. Program Afirmasi Pendidikan

Program Afirmasi Pendidikan yang digagas bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Universitas/Sekolah/Lembaga dalam bentuk Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK), Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM), dan Afirmasi Vokasi yang meliputi pendidikan di STAN, STIS, STPI, AKMIL, dan AKPOL.

i. Program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK)

Program afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) ini memberikan kesempatan bagi putra/putri asli Papua lulusan SMA/SMK untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di luar Papua. Program ini dimulai sejak 2012 dengan mengirimkan 770 siswa lulusan SMA/SMK ke 32 PTN. Melalui koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi UP4B dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud, dan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri (MRPTNI) serta Pemerintah Provinsi Papua, Papua Barat, dan Kabupaten/Kota, pada 2013 disepakati untuk disediakan kuota dan beasiswa bagi OAP yang mencapai 600 mahasiswa untuk menempuh pendidikan tinggi di 39 PTN di luar Papua dan Papua Barat. Setelah melalui tahapan seleksi hingga pengumuman kelulusan, para calon mahasiswa ADIK telah diberangkatkan ke 39 PTN di 29 kota yang tersebar mulai dari Banda Aceh hingga Maluku. Pada tahun 2015 program ADIK sudah memasuki tahun ke empat. Pada awal program ADIK, banyak sekali kesulitan untuk membujuk anak Papua mengikuti program ini melanjutkan ke perguruan lebih tinggi tetapi pada tahun ke empat peserta ADIK semakin meningkat.

ii. Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM)

Program ADEM adalah program Nasional dalam percepatan Pembangunan Papua melalui aksi afirmatif bagi Pemuda-Pemudi Papua dan Papua Barat untuk melanjutkan pendidikan ke sejumlah daerah di Pulau Jawa dan Bali. Program ADEM ini bertujuan mengembangkan Sumber Daya Manusia di Provinsi Papua dan Papua Barat dalam membentuk karakter bangsa dan mencetak kader bangsa bagi putra-putri tanah Papua yang dapat membangun Papua dan Papua Barat menjadi lebih maju. Program ADEM bergulir sejak tahun 2013 dan memasuki tahun ketiga (2015). Sebanyak 1.304 anak Papua telah menimba ilmu di tingkat SMA atau SMK di Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten dan Bali. Untuk program ADEM tercatat 505 anak Papua menempuh pendidikan SMA dan SMK di Enam Provinsi tersebut.

e. Pembangunan perpustakaan

Perpustakaan adalah sebuah koleksi buku dan majalah. Atau sebagai koleksi pribadi perseorangan, namun perpustakaan lebih umum dikenal sebagai sebuah koleksi besar yang dibiayai dan dioperasikan oleh sebuah kota atau institusi, serta dimanfaatkan oleh masyarakat yang rata-rata tidak mampu membeli sekian banyak buku atas biaya sendiri. Perpustakaan sebagai kumpulan informasi yang bersifat ilmu pengetahuan, hiburan, rekreasi, dan ibadah yang

merupakan kebutuhan hakiki manusia.

Perpustakaan merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses belajar-mengajar. Perpustakaan yang terorganisasi secara baik dan sistematis, secara langsung atau pun tidak langsung dapat memberikan kemudahan bagi proses belajar mengajar di sekolah tempat perpustakaan tersebut berada. Hal ini, terkait dengan kemajuan bidang pendidikan dan dengan adanya perbaikan metode belajar-mengajar yang dirasakan tidak bisa dipisahkan dari masalah penyediaan fasilitas dan sarana pendidikan.

Tujuan perpustakaan adalah untuk membantu masyarakat dalam segala umur dengan memberikan kesempatan dengan dorongan melalui jasa pelayanan perpustakaan agar mereka:

- Dapat mendidik dirinya sendiri secara berkesinambungan
- Dapat tanggap dalam kemajuan pada berbagai lapangan ilmu pengetahuan, kehidupan sosial dan politik
- Dapat memelihara kemerdekaan berfikir yang konstruktif untuk menjadi anggota keluarga dan masyarakat yang lebih baik
- Dapat mengembangkan kemampuan berfikir kreatif, membina rohani dan dapat menggunakan kemampuannya untuk dapat menghargai hasil seni dan budaya manusia
- Dapat meningkatkan tarap kehidupan sehari-hari dan lapangan pekerjaannya
- Dapat menjadi warga negara yang baik dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan nasional dan dalam membina saling pengertian antar bangsa
- Dapat menggunakan waktu senggang dengan baik yang bermanfaat bagi kehidupan pribadi dan sosial

f. Guru garis depan

Program Guru Garis Depan (GGD) adalah salah satu cara untuk menyebar guru ke daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T). Cara ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di daerah-daerah tersebut.

Selain untuk meningkatkan kualitas pendidikan, program GGD ini juga bertujuan pemeratakan sebaran guru. Sebab, saat ini sebaran guru kurang timpang. Guru-guru bertumpuk di perkotaan, sementara di pedesaan kekurangan tenaga pendidik. Dalam konteks lebih besar, kesempatan daerah untuk bersaing atau minimal mengejar ketertinggalan kota dalam kesejahteraan tentu makin sulit. Pada tahun 2016 terdapat 646 Guru yang disebar untuk mengikuti program GGD.

g. Penyediaan Biaya Operasional Sekolah (BOS);

Dana BOS merupakan Bantuan Pemerintah yang bertujuan meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan. Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Dana tersebut diberikan kepada setiap peserta didik untuk waktu 1 tahun. Untuk tingkat SD sebesar Delapan ratus ribu rupiah, tingkat SMP sebesar Satu juta rupiah, dan tingkat SMA/SMK sebesar Satu juta seratus ribu rupiah. Penyaluran Dana Bos untuk daerah terpencil dilakukan secara semesteran. Pemerintah provinsi wajib menyalurkan dana BOS masing-masing satuan pendidikan dalam provinsi yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya Dana BOS di RKUD provinsi.

Namun berdasarkan hasil survey lapangan yang dilakukan Tim Kajian di Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat terdapat kendala dalam proses penyaluran dana BOS. Dinas Pendidikan Kab Pegunungan Arfak mengalami kesulitan pada saat pengambilan Dana BOS yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke BANK yang ditunjuk oleh pemerintah pusat yaitu Bank BRI. Bank BRI hanya terdapat di Kab Manokwari yang jarak tempuhnya ± 90 KM dari kab Pegunungan Arfak dan memerlukan biaya transportasi yang tinggi. Dalam hal ini Dinas Pendidikan Kab Pegunungan Tengah mengharapkan adanya Pembukaan Cabang atau Anak Cabang Bank BRI untuk mempermudah penyaluran BOS.

Pengawasan dan evaluasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh Tim Pengawas yang berada di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota belum berjalan baik. Bahkan, masih sangat lemah.

Akses pendidikan di Papua sangat berkaitan dengan kondisi geografis dan sebaran penduduk. Lokasi pemukiman warga yang tersebar saling berjauhan menyebabkan sulitnya

masyarakat yang tinggal di daerah terisolir memperoleh akses pendidikan.

Apabila kekurangan fasilitas layanan pendidikan dasar dan menengah dipenuhi dalam waktu singkat akan dihadapkan dengan keterbatasan kapasitas pemerintah kabupaten dalam menyediakan infrastruktur pendukungnya. Dan, apabila kebutuhan didatangkan dari luar pulau Papua akan banyak menyebabkan banyak hambatan di dalam implementasinya, karena budaya masyarakat di daerah terisolir (lokasi yang membutuhkan fasilitas layanan pendidikan) yang sangat berbeda dengan budaya masyarakat asal guru pendatang.

Disisi lain, apabila guru didatangkan dari luar Papua akan kurang memberdayakan potensi yang ada di masyarakat lokal, serta ketidakadaannya jaminan keberadaan guru di lapangan seumur hidupnya.

Pola penyelenggaraan pendidikan yang dianggap sesuai dengan kondisi masyarakat asli Papua adalah Sekolah Berasrama. Model sekolah berasrama sebenarnya sudah dikembangkan di bumi Papua oleh Pemerintah Belanda dalam menyelenggarakan pendidikan di kalangan masyarakat asli Papua. Dan, pada saat ini sudah mulai dikembangkan model sekolah berasrama, misalnya sekolah SMP berasrama di Kaimana.

Proses belajar mengajar anak-anak di Papua dipengaruhi oleh berbagai faktor, selain kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai kondisi infrastruktur jalan dan transportasi yang tidak mendukung menjadikan anak-anak harus berjalan selama 1-3 jam melintasi hutan dan bukit dengan jarak puluhan Km untuk sampai ke sekolah mereka.

Tenaga pengajar (guru) merupakan komponen terpenting yang harus ada di dalam proses belajar-mengajar (sekolah) selain siswa itu sendiri. Tidak jarang saat siswa sudah semangat datang ke sekolah, mereka harus kecewa karena tidak ada guru yang datang. Distribusi guru antara pedalaman dengan perkotaan memang berbanding terbalik, di perkotaan kelebihan tenaga guru, sedangkan di pedalaman tenaga guru masih sangat kurang. Di pedalaman seorang guru harus mengajar dua atau tiga kelas sekaligus. Seperti yang terjadi di Kabupaten Pedalaman-Papua Barat, di sini terdapat 66 sekolah akan tetapi hanya terdapat 117 orang guru. Itu artinya setiap sekolah hanya mempunyai kurang dari dua orang guru. Umumnya para guru enggan untuk di tempatkan di daerah pedalaman karena medan yang berat dan gaji yang sering terlambat.

Umumnya siswa di pedalaman Papua hanya mempunyai satu atau dua buku tulis dengan satu pensil atau pulpen yang disimpan dalam tas kresek, mereka tidak memakai sepatu tetapi bersandal jepit atau malah kadang bertelanjang kaki. Seragam pun tidak setiap hari dipakai oleh semua siswa yang datang ke sekolah. Walaupun demikian semangat mereka untuk menimba ilmu di bangku sekolah tak kalah besar jika dibandingkan para pelajar yang ada di kota.

Pendirian sekolah satu atap merupakan inisiasi yang baik untuk melakukan pemerataan pendidikan di daerah pedalaman terutama yang berbentuk kepulauan. Program Sekolah Satu Atap terdiri dari SD dan SMP, sehingga daerah-daerah kepulauan atau pedalaman yang belum memiliki sekolah tersebut, tidak perlu lagi ke daerah lain untuk mengenyam pendidikan. Sekolah Satu Atap dapat menjadi solusi peningkatan mutu pendidikan, terutama sekolah-sekolah yang mengalami kekurangan guru, seperti terjadi di beberapa daerah pedalaman. Selain itu masuknya LSM dan keinginan perseorangan untuk mendirikan sekolah rintisan atau sekedar mengajar membaca, menulis dan menghitung dapat membantu mengatasi masalah pendidikan di daerah pedalaman.

Sekolah Berasrama Terintegrasi Satu Atap merupakan model pendidikan sekolah kecil untuk ditingkat kampung, dan sekolah yang melayani pendidikan siswa mulai kelas 4 sampai kelas 3 SMP ada di ibukota distrik dalam bentuk sekolah berasrama yang menampung siswa dari SD kecil di kampung. 5 sekolah kecil akan dilayani oleh 1 sekolah berasrama terintegrasi satu atap. Guru di sekolah kecil adalah warga masyarakat yang memiliki kemampuan baca, tulis dan hitung yang ditingkatkan kemampuannya dalam mengajar dan statusnya merupakan guru bantu yang di kontrak pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan pendidikan di kampung tersebut.

Sementara Sekolah Berasrama Terintegrasi Satu Atap merupakan sekolah dengan dilengkapi dengan guru serta fasilitas sarana dan prasarana yang lengkap sesuai standar penyelenggaraan pendidikan yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekolah juga dilengkapi dengan asrama untuk menampung siswa dari SD kecil yang tempat tinggalnya di kampung yang jaraknya sangat jauh dengan akses jalan yang tidak selalu ada dari ibukota distrik. Siswa yang tinggal di asrama juga akan mendapatkan pembelajaran tentang peradaban masyarakat modern yang harus hidup dalam ketertiban untuk bangun, tidur, mandi,

belajar pada jam tertentu, membersihkan tempat tinggal dan lingkungan, mencuci baju, dan lain lain, sehingga kehidupan siswa setelah selesai belajar di sekolah tersebut akan siap dan tidak gagap berhadapan dengan kehidupan modern yang berbeda dengan kehidupan sehari hari mereka ketika di kampungnya..

Standar sarana dan prasarana ini merupakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007. Standar ini mencakup standar sarana dan prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA). Sementara regulasi standar untuk sekolah terintegrasi berasrama satu atap sampai sejauh ini belum diadakan oleh kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Meski sudah banyak upaya dan terobosan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan pemerintah kab./kota dan Pemerintah Provinsi Papua Barat, akan tetapi faktanya upaya meningkatkan IPM Provinsi Papua Barat dari sisi pendidikan masih memerlukan upaya lebih keras lagi agar pembangunan pendidikan di Provinsi Papua Barat lebih merata, berjalan secara sistematis dalam waktu panjang dengan ketersediaan fasilitas layanan dasar pendidikan yang memadai

Sekolah Berasrama di Kabupaten Kaimana

Sekolah berasrama di Kabupaten Kaimana, dikhususkan untuk anak-anak tingkat SMP. Sampai tahun 2016 ini sudah ada sebanyak 7 unit sekolah berasrama yang tersebar di dua distrik, yaitu Distrik Kambrau dan Teluk Arguni. Untuk mencapai kedua distrik tersebut, dari Kota Kaimana harus menggunakan perahu motor untuk menyeberangi laut. Selain itu ada satu unit sekolah berasrama di Kota Kaimana untuk tingkat SMA.

Prasaran dan sarana pendidikan yang disediakan masih terbatas, sebatas penyediaan tempat menginap dan makan, penyediaan alat tulis dan keperluan belajar lainnya serta seragam sekolah. Semuanya diberikan secara gratis, karena semua biaya penyelenggaraan pendidikan berasrama tingkat SMP disediakan melalui dana APBD Kabupaten Kaimana, sedangkan untuk tingkat SMA melalui APBD Provinsi Papua Barat.